

Judul : Lembaga Legislatif; Presiden Dorong Deregulasi di DPR/DPD
Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

LEMBAGA LEGISLATIF

Presiden Dorong Deregulasi di DPR/DPD

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 pada 1 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo mengajak para legislator bersama-sama melakukan deregulasi besar-besaran sehingga banyak kebijakan bisa segera dilaksanakan.

Selain meminta agar tak terjebak dengan banyaknya regulasi, Presiden Jokowi juga berharap pembahasan aturan di lembaga legislatif bisa lebih cepat dan tak bertele-tele kendati tetap harus teliti substansinya.

"Reformasi perundang-undangan harus dilakukan besar-besaran. Jangan terjebak regulasi formalitas dan ruwet yang justru menyibukkan masyarakat ataupun pelaku-pelaku usaha," tutur Presiden Jo-

kowi saat Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan DPR dan DPD Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin (26/8/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk 711 anggota DPR dan DPD yang baru dihadiri juga oleh Gubernur Lemhannas Letnan Jenderal Agus Widjojo.

Menurut Presiden Jokowi, Revolusi Industri 4.0 dan perubahan yang sangat cepat membuat negara-negara yang cepat yang akan menang, bukan negara yang besar. Karena itu, perlu ada strategi baru bernegara, di antaranya pembuatan regulasi yang perlu kecepatan.

Dicontohkan, setiap kepala negara, kepala pemerintahan, dan raja dalam setiap konferensi internasional seperti G-20 ataupun Asian Summit selalu

menceritakan regulasi yang tertinggal dengan teknologi.

Regulasi di Indonesia dinilai juga terlalu banyak sehingga menjerat dan menghambat diri sendiri. Oleh karena itu, perlu peraturan yang sederhana sehingga eksekutif bisa berjalan lebih cepat dan fleksibel.

Presiden berharap DPR tak membuat aturan perundangan yang terlalu banyak, tetapi benar-benar yang diperlukan. Selain itu, aturan juga harus tetap memberikan fleksibilitas pada eksekutif bekerja.

Anggota DPR periode 2019-2024 dari PDI-P, Bambang DH, yang pernah menjabat Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, merasakan banyak regulasi yang membuat pemerintahannya waktu itu menjadi tidak fleksibel akibat banyak regulasi. (INA)